

ABSTRACT

The purpose of this research is to see how Public Relations of The Honorary Board of General Election Organizer Republik of Indonesia (DKPP RI) socializing and publicating the role of that institution in the enforcing the code of ethics of general election 2014. This research is using Public Relations theory by Edward L. Berneys.

This research uses constructive paradigm. With qualitative and case study approach as its methods, this research shows that DKPP PR has been succesful in delivering information, persuasion, and integrating in relation with the role of DKPP RI in the enforcement of code of ethics of election 2014 to the election body (KPU) and Election Supervisory Body (Bawaslu), political parties, and the public. In addition to that result, there are also some supporting factors and some barriers. One of the barrier factor is that DKPP position as one of the four bureaus at the general secretariat of Bawaslu. DKPP PR is yet to become an independent body, which will be able to perform its functions properly under its own general secretariat of DKPP.

Beside that, the figure of the chairman of and some of members still become a symbol of the existence of this institution thereby if this institution is not lead by persons with big names perhaps the DKPP role is not as big as itis now. In this regard, it is suggested that general secretariat of DKPP is not attached to the general secretariat of Bawaslu. It is also necessary for regeneration of person that may be able to lead DKPP RI in the future, and most importantly this reasearch can be continued in order to generalization the findings.

Keywords: general election, code of ethics, public relations of DKPP, Edward L. Berneys.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana fungsi Humas DKPP RI dalam memublikasikan dan menyosialisasikan tentang peran DKPP RI dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu 2014 dan sekaligus mencari tahu faktor pendukung dan penghambat fungsi Humas DKPP RI dalam menyosialisasikan dan memublikasikan tentang peran DKPP RI dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu 2014 dengan menggunakan teori public relations dari Edward L. Berneys.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis. Dengan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus peneliti menemukan bahwa Humas DKPP telah berfungsi memberikan informasi, persuasi dan integrasi berkaitan dengan peran DKPP RI dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu 2014 kepada penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu, peserta pemilu, dan masyarakat. Selain itu ditemukan beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor penghambat antara lain bahwa lembaga DKPP masuk menjadi salah satu dari empat Biro pada Sekretariat Jenderal Bawaslu. Humas DKPP belum menjadi bagian tersendiri dan seharusnya bisa menjalankan fungsinya secara terukur di bawah Sekretariat Jenderal DKPP yang mandiri.

Selain itu faktor ketokohan ketua serta beberapa anggota masih menjadi simbol keberadaan lembaga sehingga dikhawatirkan jika lembaga ini bukan dipimpin oleh tokoh-tokoh yang memiliki nama besar boleh jadi peran DKPP tidak sebesar sekarang. Berkaitan dengan hal itu maka disarankan Sekretariat Jenderal DKPP RI tidak melekat dengan Sekretariat Jenderal Bawaslu. Juga perlu ada kaderisasi tokoh yang mungkin memimpin DKPP RI ke depan dan yang terpenting penelitian ini bisa dilanjutkan agar temuannya bisa digeneralisasikan.

Kata kunci: pemilu, kode etik penyelenggara pemilu, humas DKPP RI, Edward L. Berneys.